

TIPOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN SMART CITY DI MASA PANDEMI COVID-19 (KASUS : KOTA YOGYAKARTA)

Typology of Smart City Implementation in The Time of The Covid-19 Pandemic (Case: Yogyakarta City)

¹Fitri Noviyanti & ²Achmad Djunaedi

^{1&2} Universitas Gadjah Mada

e-mail: ¹fitri.noviyanti@mail.ugm.ac.id & ²adjun@ugm.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history :

Dikirim :
 17-12-2021
 Revisi Pertama :
 27-12-2021
 Diterima :
 28-12-2021

Kata Kunci :

Tipologi, smart city, pandemi

Keywords :

Typology, smart city, pandemic

Perkembangan Smart City di berbagai belahan dunia saat ini harus beradaptasi dengan kondisi yang baru akibat terjadinya pandemi COVID-19. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang proses perkembangan *smart city* nya harus beradaptasi pada kondisi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tipologi pelaksanaan Smart City dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi pelaksanaan Smart City di Kota Yogyakarta di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi data-data sekunder. Sedangkan pengolahan data dilakukan melalui reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang proses implementasinya lebih cepat di dominasi oleh kegiatan yang dilaksanakan secara daring, sedangkan kegiatan yang proses implementasinya terhambat didominasi oleh kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Selain itu kegiatan-kegiatan hasil inovasi baru didominasi oleh kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan kasus COVID-19 beserta pemulihan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi kondisi pelaksanaan kegiatan Smart City di Kota Yogyakarta terbagi kedalam enam kategori yakni kategori masyarakat, kondisi pemerintah, kondisi kegiatan, kondisi infrastruktur serta faktor kolaborasi.

Abstract

The current development of Smart City must adapt to new conditions due to the COVID-19 pandemic. Yogyakarta is one of the cities whose smart city development process must adapt to these conditions. The purpose of this study was to determine the typology of Smart City implementation and identify the factors that influence the typology of Smart City implementation in Yogyakarta City during the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative method. triangulation of data sources by exploring the truth of certain information through various methods and sources of data acquisition. Data was collected through in-depth interviews and observation of secondary data. Data processing is done through data reduction. The results show that activities whose implementation process is faster are dominated by activities carried out online, while activities whose implementation process is hampered are dominated by activities that cause crowds. In addition, activities resulting from new innovations are dominated by activities aimed at controlling

COVID-19 cases and economic recovery. The factors that influence the conditions of implementing Smart City activities in the city of Yogyakarta are divided into six categories, namely the community category, government conditions, activity conditions, infrastructure conditions and collaboration factors.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan *Smart City* di berbagai belahan dunia saat ini harus beradaptasi dengan kondisi yang baru akibat adanya Pandemi COVID-19. Menurut Panduan Worldwide Smart Cities Spending Guide terbaru yang dikeluarkan oleh Internet Data Center (IDC), tingkat pertumbuhan ekonomi dari *Smart City* global melambat lantaran adanya Pandemi COVID-19. Padahal saat sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi di *Smart City* berkembang pesat lebih dari 15 persen pertahun. Menurut (Firmansyah 2020), perkembangan *Smart City* di Indonesia juga terpengaruh oleh Pandemi COVID-19 karena mayoritas kota-kota di Indonesia harus memecah fokusnya untuk dapat mengendalikan kasus COVID-19 di kota tersebut. Meskipun penggunaan teknologi telah marak digunakan selama masa pandemi, tetapi sumber daya *Smart City* yang ada di sejumlah kota-kota besar di Indonesia belum mampu mengatasi persoalan penyebaran virus Covid-19.

Namun terdapat pula beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa terjadinya Pandemi COVID-19 mempercepat implementasi konsep dan kegiatan-kegiatan *Smart City* di Indonesia. Salah satu contoh kegiatan *Smart City* yang prosesnya terakselerasi adalah ekonomi digital yakni ebanyak 37 persen konsumen baru ekonomi digital telah muncul selama Pandemi COVID-19 dan 93 persen di antaranya akan tetap memanfaatkan produk ekonomi digital pasca Pandemi COVID-19. Kondisi Pandemi COVID-19 juga telah mendorong perkembangan pesat pada teknologi pendidikan dan kesehatan sebagai dampak penerapan pembelajaran dan konsultasi kesehatan secara online (Google, Temasek, and Company 2020).

Selain itu terdapat pula beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa terjadinya Pandemi COVID-19 mampu memberikan dorongan munculnya kegiatan-kegiatan baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada *Smart City*. Farizia and Hermawan (2020) menyebutkan bahwa contoh implementasi konsep *Smart City* di Kabupaten Banyuwangi melalui Smart Kampung dapat membantu pemerintah kabupaten untuk mengendalikan Pandemi COVID-19 dan menuju tatanan normal baru. Inovasi Smart Kampung di era Pandemi COVID-19 melingkupi munculnya kegiatan-kegiatan baru seperti pelayanan publik di masa new normal, pendataan dan distribusi bansos melalui daring, pendataan dan distribusi nutrisi ibu hamil dengan website, serta data mobilitas warga melalui sistem tracing yang diberlakukan di Kabupaten tersebut. Inovasi yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi sebuah refleksi bahwa teknologi dalam konsep *Smart City* dapat dimanfaatkan untuk menghadapi krisis, khususnya Pandemi COVID-19. Selain itu, sarana teknologi informasi dapat menjadi solusi dalam melewati fase emergency dan recovery akibat tekanan COVID-19, untuk kemudian mempersiapkan tatanan new normal. Penelitian yang dilakukan oleh Kummitha (2020) juga menjelaskan hal yang serupa yakni terjadinya Pandemi COVID-19 mampu mendorong inovasi baru melalui pemanfaatan unsur-unsur dalam *Smart City* yang terdiri dari unsur manusia cerdas yang mampu bekerjasama dengan kolaboratif serta unsur infrastruktur digital dan teknologi yang mendukung proses pengendalian penyelesaian masalah penyebaran Virus COVID-19 di masa sekarang.

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pandemi memberikan efek yang cukup beragam pada kondisi *Smart City* yakni dalam bentuk akselerasi atau percepatan konsep dan kegiatan, dalam bentuk hambatan dan juga dalam bentuk inovasi-inovasi baru untuk membantu pengendalian COVID-19. Hal tersebut menjadi latar belakang yang mendasari penelitian ini dikarenakan belum adanya konsep yang jelas mengenai pengaruh terjadinya pandemi terhadap tipologi pelaksanaan kegiatan *Smart City* pada kota-kota di Indonesia. Sehingga penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui secara lebih detail di lapangan terkait pengaruh terjadinya Pandemi COVID-19 pada kondisi *Smart City* melalui identifikasi tipologi pelaksanaan kegiatan *Smart City* tersebut di masa Pandemi COVID-19 saat ini. Setelah mengetahui tipologi pelaksanaan tersebut maka juga akan dianalisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan *Smart City*

pada kota kajian. Hasil temuan-temuan penelitian pada kota tersebut nantinya mampu memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan konsep *Smart City* khususnya di masa Pandemi COVID-19.

Kota Yogyakarta menjadi fokus kasus kota kajian pada penelitian ini dikarenakan memiliki beberapa keunikan. Kota Yogyakarta merupakan kota yang dikenal sebagai kota budaya yang memiliki beberapa keunikan seperti potensi kebudayaan, filosofi dan pemikiran Jawa akibat faktor-faktor historis yang tidak ada pada kota lain. Perkembangan *Smart City* pada Kota Yogyakarta sejak tahun 2018 tersebut berjalan baik dimulai dari pelaksanaan kegiatan pada sasaran jangka pendek dan menengah. Terjadinya Pandemi COVID-19 ini membuat proses pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* di Kota Yogyakarta tersebut sempat terkendala dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran serta kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Selain itu, Kota Yogyakarta ini menjadi unik karena di masa terjadinya Pandemi COVID-19 khususnya pada tahun 2020, kegiatan *Smart City* di Kota Yogyakarta justru melakukan banyak inovasi-inovasi dibandingkan kota-kota lain yang memulai Gerakan Menuju 100 *Smart City* pada tahun 2018. Contohnya adalah saat Pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan layanan Go-Shop pasar tradisional serta juga teknologi scan-QR di kawasan malioboro untuk membatasi pengunjung. Namun inovasi-inovasi yang dilaksanakan pada kedua kota tersebut belum tentu menunjukkan tidak terjadi tipologi pelaksanaan kegiatan sebagai dampak Pandemi COVID-19 dalam bentuk kegiatan yang terhambat ataupun kegiatan yang implementasinya lebih cepat. Sehingga hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti terkait kondisi tipologi pelaksanaan kegiatan *Smart City* di kedua pada masa Pandemi COVID-19.

Jumlah kasus COVID-19 di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang cukup tinggi bagi kota menengah lain yang juga memiliki jumlah penduduk diantara 100.000 hingga 500.000 jiwa. Jumlah kasus COVID-19 di Kota Yogyakarta per tanggal 19 Desember 2020 telah mencapai 2.078 kasus. Dibandingkan kota-kota menengah yang sejenis, angka tersebut termasuk cukup tinggi dibandingkan dengan Kota Cimahi yang per tanggal 19 Desember 2020 jumlah kasusnya sejumlah 1.281. Tingginya jumlah kasus COVID-19 di kedua kota pada tahun 2020 menjadi hal yang menarik untuk diketahui kaitan dan pengaruhnya terhadap kondisi pelaksanaan *Smart City* di Kota Yogyakarta melalui identifikasi tipologi pelaksanaan kegiatan berdasarkan ragam dan jenis dampak terhadap implementasi *Smart City* yang sudah disampaikan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kondisi tipologi pelaksanaan *Smart City* di Kota Yogyakarta di masa Pandemi COVID-19 dan (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi pelaksanaan *Smart City* di Kota Yogyakarta di masa pandemi COVID-19.

B. METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Sugiyono (2017) yang menjelaskan penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar serta tidak menekankan pada angka.

Menurut Yin (2008), studi kasus merupakan metode penelitian yang cocok jika pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa). Selain itu, studi kasus juga digunakan apabila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan jika fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan penelitian yaitu "bagaimana" strategi pengembangan *Smart City* di masa pandemi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan tersebut. Peneliti dalam hal ini tidak memiliki kontrol terhadap strategi yang dilakukan masing-masing kota dalam melaksanakan *Smart City* di masa pandemi. Selain itu topik terkait pandemi yang dikaitkan dengan *Smart City* adalah topik yang sangat baru atau bersifat kontemporer sehingga penelitian ini sangat tepat menggunakan metode studi kasus.

Pada penelitian ini terdapat dua jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh melalui dokumen tertulis, data instansional, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi dan gambar untuk mendukung analisis yang dilakukan. Proses wawancara dilakukan pada sejumlah informan yang berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta. Proses penentuan informan

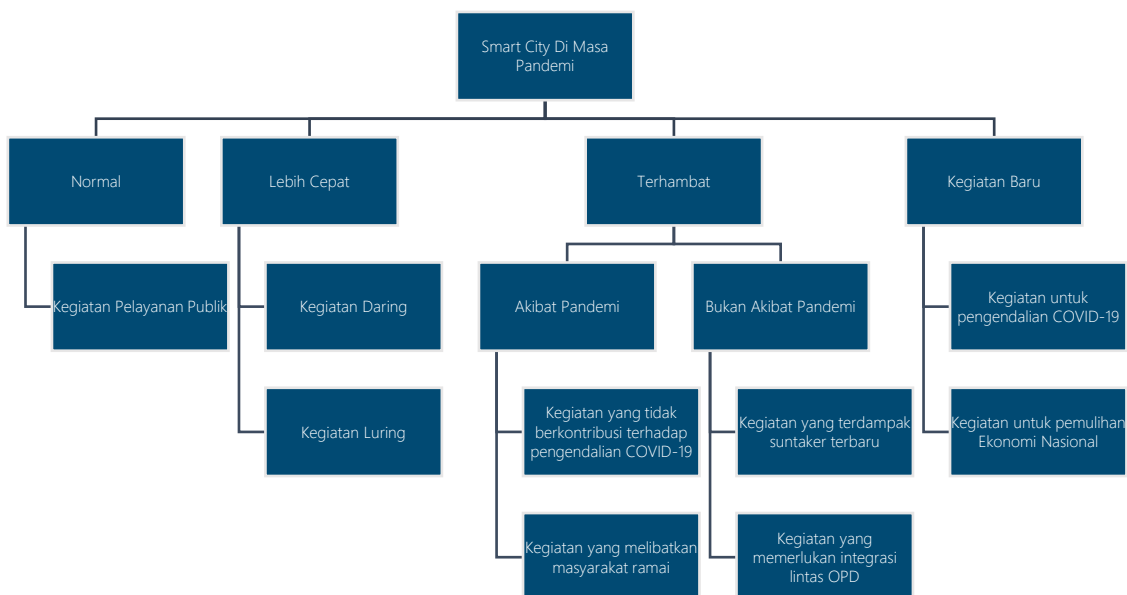
dilakukan secara snowball. Strategi umum analisis data pada metode studi kasus terdiri dari dua strategi yaitu: mendasarkan pada proposisi teoritis dan pengembangan deskripsi kasus. Peneliti menggunakan strategi proposisi teoritis untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana dan mengapa karena temuan-temuan yang diperoleh di lapangan diuraikan secara deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Yogyakarta merupakan wilayah administrasi yang memiliki luasan terkecil dibandingkan kabupaten lain yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Hektar atau hanya 1,02 persen dari luas total Provinsi DIY. Kota Yogyakarta berbatasan dengan Kabupaten Bantul di bagian Selatan dan Kabupaten Sleman di bagian utara, timur serta di bagian barat. Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga, dan 2.532 Rukun Tetangga.

Tipologi Pelaksanaan Kegiatan *Smart City* di Masa Pandemi COVID-19

Perkembangan *Smart City* di berbagai belahan dunia saat ini harus beradaptasi dengan kondisi yang baru akibat terjadinya Pandemi COVID-19. Terjadinya Pandemi COVID-19 ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan *Smart City* khususnya di Kota Yogyakarta. Hasil identifikasi dan analisis informasi dari proses wawancara pada Organisasi Perangkat Daerah terkait kondisi *Smart City* di lokasi kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa karakteristik pelaksanaan kegiatan smart city di masa Pandemi COVID 19 ini. Beberapa karakteristik dan tipologi pelaksanaan kegiatan tersebut dianalisis berdasarkan proses implementasinya pada tahun 2020. Tipologi tersebut terdiri dari kegiatan yang berjalan normal, kegiatan yang implementasinya lebih cepat karena pandemi, kegiatan yang terhambat karena pandemi, kegiatan yang terhambat karena faktor lain selain pandemi serta kegiatan baru yang muncul karena pandemi.



Gambar 1 Tipologi Pelaksanaan Kegiatan *Smart City* di Masa Pandemi COVID-19 Kota Yogyakarta
Sumber : Analisis Penulis, 2021

1. Kegiatan Berjalan Normal

Kuartal pertama tahun 2020 menjadi awal kemunculan kasus COVID-19 di Indonesia yang memicu pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru sebagai respon dan salah satunya adalah kebijakan social distancing. Terdapat parameter penting dalam pelaksanaan social distancing diantaranya adalah penetapan work from home bagi lini pekerjaan yang dapat dikerjakan dirumah, penutupan bisnis tertentu serta pembatasan perjalanan (World Bank, 2020). Dari beberapa parameter tersebut, terdapat urgensi bagi pemerintah daerah untuk dapat menerapkan social distancing dengan melalui pengoptimalan teknologi informasi pada pelayanan publik.

Kegiatan yang berjalan normal adalah kegiatan pelayanan publik yang tetap dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk berjalan normal tersebut bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas kondisi di masa Pandemi COVID-19 serta untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di lingkup direncanakan serta diselenggarakan secara kreatif dalam hadapi tantangan di tengah Pandemi COVID-19. Pelayanan publik tetap harus berjalan dan terus melakukan penyesuaian sesuai dengan prinsip adaptif, kompetitif dan juga transparan.

Kegiatan-kegiatan yang berjalan normal tersebut merupakan kegiatan pelayanan publik yang sudah melakukan penyesuaian dalam proses pelaksanaannya baik dengan melakukan transformasi digital maupun tetap berjalan seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari seluruh kegiatan *Smart City* yang terdapat pada kedua kota, pemilihan kegiatan yang tetap berjalan normal ditentukan melalui rapat koordinasi dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti ketersediaan anggaran, penyesuaian tata cara dan mekanisme layanan serta kebijakan terkait social distancing. Tipologi kegiatan yang berjalan normal tidak menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini karena kondisi implementasi kegiatannya tidak mengalami perubahan setelah terjadinya Pandemi COVID-19.

2. Kegiatan Yang Implementasinya Lebih Cepat Karena Pandemi

Terjadinya Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada proses implementasi kegiatan-kegiatan *Smart City* di Kota Yogyakarta. Beberapa kegiatan *Smart City* pada kota tersebut mengalami akselerasi pada proses pelaksanaannya karena beberapa faktor akibat Pandemi COVID-19. Kegiatan yang implementasinya lebih cepat adalah kegiatan yang awalnya termasuk kedalam kegiatan pelayanan publik untuk tetap berjalan normal namun pada proses implementasinya berjalan lebih cepat di saat Pandemi karena penyesuaian kondisi dan kebutuhan, perubahan tata cara layanan dan faktor-faktor lainnya. Kegiatan-kegiatan *Smart City* yang implementasinya lebih cepat diidentifikasi melalui hasil evaluasi kegiatan pada tahun 2020 dengan melihat capaian kinerja kegiatan yang melebihi target pada rencana kinerja awal tahun. Selain itu proses identifikasi juga dapat dilihat berdasarkan perkembangan pengguna layanan yang meningkat dari tahun sebelum Pandemi COVID-19.

Kegiatan yang proses implementasinya lebih cepat terdiri dari beberapa tipologi diantaranya kegiatan daring dan juga kegiatan luring. Desakan penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan semakin tinggi sejak terjadinya pandemi ini karena memaksa masyarakat membatasi mobilitas dan anjuran beraktivitas di rumah untuk memutus persebaran virus sehingga pada kondisi tersebut kehadiran layanan pemerintah harus segera bertransformasi dalam bentuk daring untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Mayoritas kegiatan yang terlaksana semakin cepat akibat Pandemi COVID-19 berbentuk kegiatan daring di Kota Yogyakarta.

Tabel 1 Jenis Kegiatan *Smart City* dengan Implementasi Lebih Cepat di Kota Yogyakarta

Dimensi	Implementasi Lebih Cepat	Tipologi	Keterangan
<i>Smart Governance</i>	Pelayanan Administrasi Kependudukan Online	Kegiatan Daring	Memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga pelayanan dialihkan online karena Pandemi
	Jogja Smart Services (JSS)	Kegiatan Daring	
	Perizinan Berusaha Elektronik	Kegiatan Daring	
<i>Smart Branding</i>	Online Ticketing Taman Pintar	Kegiatan Daring	
<i>Smart Economy</i>	QR Code Retribution	Kegiatan Daring	
<i>Smart Society</i>	Pemasangan free hotspot pada RTH permukiman	Kegiatan Luring	Menyediakan kebutuhan masyarakat yang melaksanakan kegiatan dari rumah saat Pandemi

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan daring menjadi lebih cepat pada proses implementasinya adalah sarana prasarana digital kota yang sudah baik, kualitas sumber daya pemerintahan dan masyarakat yang juga baik, kolaborasi antar OPD yang menjalankan kegiatan,

adanya transformasi pelayanan publik, pelaksanaan sosialisasi kegiatan serta kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat. Sarana prasarana digital yang baik sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan daring karena menunjang dan membantu proses pelaksanaan dan penggunaan layanan. Infrastruktur digital seperti jaringan, server, work station maupun data center menjadi faktor penentu perangkat daerah untuk dapat memberikan layanan publik secara daring kepada masyarakat kotanya. Selain itu peran infrastruktur digital terutama jaringan juga sangat mempengaruhi minat masyarakat pada kedua kota untuk dapat menggunakan layanan daring.

Selain infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia juga memberikan pengaruh cukup besar bagi percepatan implementasi kegiatan-kegiatan daring di *Smart City* Yogyakarta. Hal tersebut terjadi karena berkaitan dengan proses pemberian layanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga sumber daya manusia baik sebagai penyedia maupun pengguna layanan sebaiknya memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan layanan dan infrastruktur yang disediakan. Kualitas sumber daya manusia yang baik juga akan memiliki kompetensi untuk dapat melaksanakan koordinasi dengan baik sehingga berkaitan dengan faktor kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah di internal pemerintah. Kolaborasi antar OPD yang melaksanakan layanan juga sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan daring karena mayoritas kegiatan-kegiatan *Smart City* yang bersifat daring adalah kegiatan kolaborasi OPD terkait dengan Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggaraan pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi.

Kegiatan-kegiatan daring pada *Smart City* Kota Yogyakarta menjadi lebih cepat proses implementasinya juga disebabkan karena proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh seluruh OPD terkait kegiatan-kegiatan yang mengalami transformasi layanan menjadi daring. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan kependudukan daring, pembayaran pajak daring dan kegiatan lainnya merupakan kegiatan yang juga lebih cepat implementasinya karena pada saat Pandemi COVID-19, masyarakat tetap membutuhkan layanan tersebut sehingga mereka menyesuaikan dengan kondisi pelayanan terbaru yakni melalui aplikasi maupun website. Hal tersebut menarik karena beberapa pelayanan daring lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak mengalami akselerasi atau tetap berjalan normal. Contoh kegiatannya adalah e-monev yang memang hanya ditujukan untuk para aparatur pemerintahan saja.

Tipologi lainnya pada kegiatan yang pelaksanaannya lebih cepat adalah pelaksanaan kegiatan luring. Namun tipologi ini hanya terdapat di Kota Yogyakarta khususnya pada dimensi smart society. Tipologi kegiatan ini cukup jarang ditemukan karena mayoritas kegiatan luring memang ditiadakan atau dikurangi selama masa Pandemi COVID-19 untuk mengurangi penularan virus tersebut. Kegiatan luring yang bersifat terakselerasi adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pada kondisi pandemi. Contoh kegiatan luring yang proses implementasinya lebih cepat adalah pemasangan Wifi di ruang-ruang publik. Hal tersebut menjadi contoh nyata bahwa kegiatan luring yang terlaksana lebih cepat adalah kegiatan yang bersifat berhubungan langsung dengan masyarakat dan merupakan kebutuhan masyarakat untuk dapat tetap melaksanakan kegiatan dari rumah saja.

3. Kegiatan Yang Implementasinya Terhambat Karena Pandemi

Terjadinya Pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap akselerasi pelaksanaan *Smart City* di Kota Yogyakarta, namun juga berdampak menghambat beberapa kegiatan *Smart City* yang ada khususnya pada tahun 2020. Kegiatan yang implementasinya terhambat karena pandemi adalah kegiatan *Smart City* yang tidak dapat terlaksana atau ditunda pelaksanaannya akibat terjadinya Pandemi COVID-19 dikarenakan akan menimbulkan keramaian atau karena adanya kebijakan refocusing anggaran. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk ditunda dan ditiadakan selama masa Pandemi COVID-19 ini dilakukan melalui rapat koordinasi antar OPD di masing-masing kota dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini, kebijakan, rencana anggaran serta kontribusi masing-masing kegiatan dalam pengendalian COVID-19.

Tabel 2 Kegiatan *Smart City* Implementasi Terhambat di Masa Pandemi COVID-19

Dimensi	Kegiatan	Tipologi	Keterangan
<i>Smart Governance</i>	Pembangunan <i>Fiber Optic</i> Mandiri	Kegiatan tidak berkontribusi terhadap pengendalian COVID-19	<i>Refocusing</i> anggaran dan kendala lapangan
	Pembangunan <i>Fiber Optic</i> ATCS GPS Tracking		<i>Refocusing</i> anggaran

Dimensi	Kegiatan	Tipologi	Keterangan
<i>Smart Branding</i>	Festival kampung wisata	Kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai	Ditunda karena agar tidak menimbulkan kerumunan
	Akreditasi kampung wisata		
	Jelajah sejarah		
	Gelar potensi ekonomi kreatif		
	Pentas kangen jogja		
<i>Smart Living</i>	Jogja kreatif (CFD)	Kegiatan tidak berkontribusi terhadap pengendalian COVID-19	<i>Refocusing</i> anggaran
	Peta Sebaran Bangunan berbasis GIS		
<i>Smart Economy</i>	Pembuatan Sistem Informasi Pertanahan	Kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai	Tidak melaksanakan perjalanan luar kota karena Pandemi
	Jogja Mandiri Expo		
<i>Smart Society</i>	Permak Jas Kota	Kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai	Tidak ada kegiatan rapat luring karena WFH
	Edukasi pencegahan kebakaran		Ditunda karena agar tidak menimbulkan kerumunan
	Pembentukan satuan relawan kebakaran		<i>Refocusing</i> anggaran
Pembangunan jaringan hydran kering			
<i>Smart Environment</i>	Reresik Malioboro pada Selasa Wage	Kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai	Tidak dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerumunan

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Terdapat beberapa tipologi pada pelaksanaan kegiatan yang terhambat akibat Pandemi COVID-19 ini diantaranya adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai, kegiatan yang tidak berkontribusi pada pengendalian COVID-19 serta kegiatan yang memerlukan dana besar pada proses pelaksanaannya. Tipologi kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai adalah jenis kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah. Kegiatan tersebut ditunda karena untuk mengurangi penularan virus. Sedangkan tipologi kegiatan yang tidak berkontribusi pada pengendalian COVID-19 merupakan kegiatan-kegiatan *Smart City* yang dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan refocusing anggaran serta pertimbangan bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada pengendalian kasus COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Selain itu kegiatan tersebut juga bukan merupakan kegiatan pelayanan publik esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian tipologi kegiatan yang memerlukan dana besar adalah kegiatan megaproyek yang juga terdampak dari adanya refocusing anggaran sehingga ditunda pelaksanaannya ketika kondisi kasus COVID-19 dan perekonomian masing-masing daerah sudah membaik.

Tipologi kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai menjadi terhambat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah ditetapkan kebijakan social distancing serta faktor kepemimpinan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menekan penularan virus COVID-19 adalah membatasi mobilitas masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan social distancing. Beberapa istilah terkait kebijakan pembatasan mobilitas tersebut bersifat dinamis mulai dari Social Distancing, Physical Distancing, Kebijakan PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 3 dan Level 4. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan *Smart City* terutama di Kota Yogyakarta. Kebijakan tersebut memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat menjadi ditunda serta ditiadakan untuk dapat mengurangi penularan kasus. Selain itu faktor kepemimpinan kepala daerah juga menjadi penentu pada pemilihan kegiatan-kegiatan yang harus ditunda dan tidak dilaksanakan berkaitan dengan kebijakan social distancing yang diberlakukan.

4. Kegiatan Yang Implementasinya Terhambat Akibat Faktor Selain Pandemi

Kegiatan yang terhambat pelaksanaannya selama masa pandemi juga terdiri dari kegiatan-kegiatan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang terakomodir dalam tipologi kegiatan yang implementasinya terhambat akibat faktor selain Pandemi COVID-19. Kegiatan yang implementasinya terhambat bukan karena pandemi adalah kegiatan yang awalnya termasuk kedalam pelayanan publik

yang berjalan normal namun tidak dapat terlaksana atau ditunda pelaksanaannya akibat faktor-faktor lain selain pandemi. Identifikasi kegiatan pada tipologi ini dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja kegiatan baik itu evaluasi tengah tahun maupun evaluasi akhir tahun.

Tabel 3 Kegiatan Terhambat Karena Fakotr Lain

Dimensi	Kegiatan	Tipologi	Keterangan
<i>Smart Governance</i>	Aplikasi Potensi Investasi	Terdampak suntaker terbaru	Adaptasi karena peleburan dua kegiatan
	Pelayanan Perizinan online		
<i>Smart Living</i>	Pendataan jumlah kendaraan	Kegiatan memerlukan integrasi Lintas OPD	Kendala integrasi OPD
<i>Smart Economy Smart Society</i>	SI Pembinaan Industri	Terdampak suntaker terbaru	Kendala kesiapan OPD
	SIMGAKDA	Kegiatan memerlukan integrasi Lintas OPD	Kendala kesiapan dan integrasi OPD
<i>Smart Environment</i>	Retrivel Anak Putus Sekolah Rumah Belajar	Terdampak suntaker terbaru	Pemindahan kewenangan
	Pembayaran biaya layanan penyedotan tinja	Kegiatan memerlukan integrasi Lintas OPD	Perubahan prioritas
	L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)		Kendala kesiapan dan integrasi OPD

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Tipologi pada kegiatan yang implementasinya terhambat akibat faktor selain pandemi terdiri dari kegiatan yang terdampak suntaker terbaruserta kegiatan integrasi antar OPD. Tipologi kegiatan yang terdampak suntaker terbaru adalah kegiatan yang terdampak dari adanya penyusunan tatanan kinerja baru pada lingkup organisasi perangkat daerah khususnya yang di Kota Yogyakarta. Tipologi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya adaptasi peleburan kegiatan serta pemindahan wewenang kegiatan. Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis terbaru tersebut memberikan banyak perubahan sehingga membutuhkan adaptasi terhadap penyesuaian kebijakan tersebut. Adanya kebijakan suntaker terbaru juga menyebabkan adanya perubahan pemindahan wewenang kegiatan seperti yang awalnya berada di naungan pemerintah kota kemudian berubah menjadi wewenang pemerintah desa. Tipologi terakhir pada kegiatan yang proses terhambat akibat faktor lain selain pandemi adalah kegiatan yang memerlukan integrasi lintas OPD. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan integrasi lintas OPD adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh satu OPD penanggung jawab saja melainkan hasil kolaborasi antar beberapa OPD penyelenggara. Kegiatan yang bersifat memerlukan integrasi antar OPD ini terhambat pelaksanaannya dikarenakan oleh faktor sulitnya melaksanakan koordinasi antar OPD tersebut. Kegiatan-kegiatan yang terhambat pada tipologi ini tidak berkaitan dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi pada kota terkait.

5. Kegiatan Baru Karena Pandemi

Pengendalian kasus COVID-19 menuntut pemerintah daerah untuk dapat inovatif dalam proses pengendaliannya sehingga terdapat beberapa kegiatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menangani Pandemi COVID-19 dan termasuk kedalam kegiatan *Smart City*. Kegiatan baru akibat pandemi adalah kegiatan *Smart City* baru yang dilaksanakan dengan inovasi yang bertujuan untuk dapat membantu menangani kasus COVID-19 dan memulihkan kondisi perekonomian. Penyusunan kegiatan baru tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi dengan menyesuaikan urgensi kegiatan serta ketersediaan anggaran di masing-masing kota.

Tabel 4 Kegiatan *Smart City* Baru Karena Pandemi COVID-19

Dimensi	Kegiatan	Tipologi	Keterangan
<i>Smart Governance</i>	Scan Barcode untuk tracing pengunjung melalui kunjungan.jogjakota.go.id .	Kegiatan pengendalian COVID-19	Untuk menangani Pandemi COVID-19
	Penyediaan <i>room online</i> untuk rapat setiap OPD		
			Untuk memudahkan pelaksanaan WFH karena Pandemi

Dimensi	Kegiatan	Tipologi	Keterangan
	Pelayanan mobile e-KTP/ <i>drive thru</i>		Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mengurangi kerumunan
	Pengadaan system yang terintegrasi dengan kabupaten lain di DIY untuk informasi COVID-19		Untuk menangani Pandemi COVID-19
<i>Smart Branding</i>	Dolan Kampung Wisata dalam Masa New Normal	Kegiatan pemulihan ekonomi	Untuk memulihkan perekonomian karena Pandemi
	Film Virtual Jogja 360 derajat		Untuk memberikan pengalaman wisata secara virtual
	Wayang Jogja Night Carnival (WJNC)		Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mengurangi kerumunan
	Aplikasi E-Booking		Untuk mengurangi kontak antar pengunjung wisata agar tidak tertular COVID-19
<i>Smart Living</i>	Pengadaan peralatan untuk mendukung protocol kesehatan	Kegiatan pengendalian COVID-19	Untuk menangani Pandemi COVID-19

Sumber : Analisis Penulis, 2021

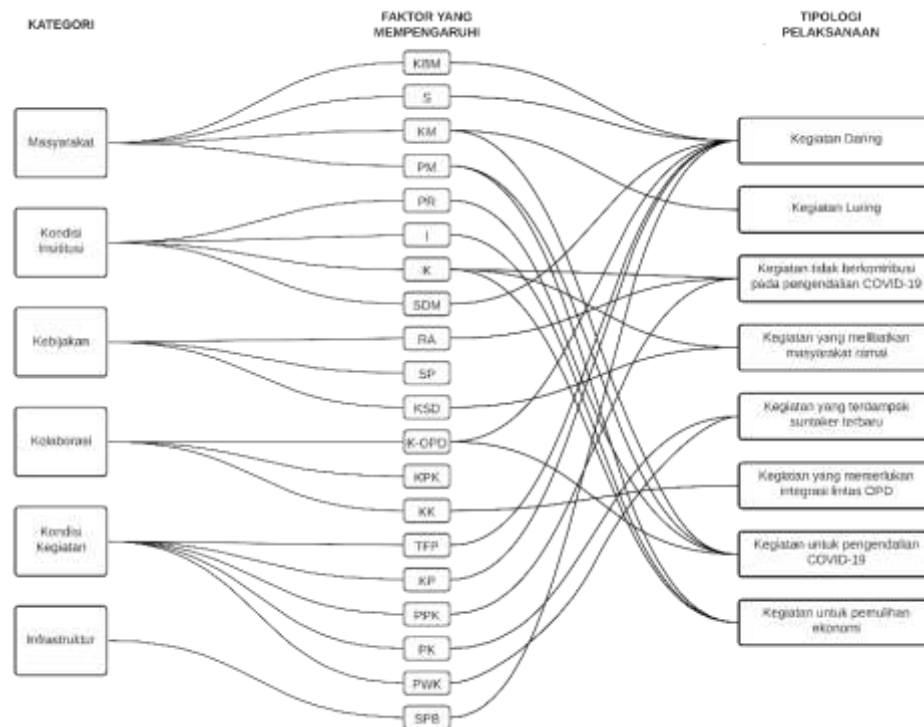
Terdapat dua tipologi pelaksanaan kegiatan *Smart City* baru akibat Pandemi COVID-19 diantaranya adalah kegiatan untuk pengendalian COVID-19, kegiatan untuk pemulihan ekonomi serta kegiatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Tipologi kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian COVID-19 merupakan jenis kegiatan baru dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah faktor penyesuaian kebutuhan masyarakat dan prioritas permasalahan, bentuk dari pemerintah responsif, adanya inovasi, kepemimpinan serta kolaborasi yang dilaksanakan antar OPD di masing-masing kota. Kegiatan baru ini diprioritaskan pelaksanaannya karena faktor pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait kasus pengendalian COVID-19 serta bentuk dari respon pemerintah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Selain itu, inovasi dan koordinasi menjadi faktor penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan baru dalam rangka pengendalian kasus COVID-19 yang ada. Mayoritas bentuk kegiatan-kegiatan baru untuk pengendalian COVID-19 merupakan kegiatan daring seperti tracing korban positif, pendaftaran vaksinasi, informasi ketersediaan rumah sakit dan pelayanan lainnya.

Tipologi selanjutnya adalah tipologi kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan ini sebenarnya merupakan bagian dari pengendalian COVID-19 namun lebih berfokus pada hal kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah. Pembatasan kegiatan fisik juga berdampak sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian masyarakat sehingga membutuhkan inovasi penyelesaian masalah yang diwujudkan oleh beberapa kegiatan baru dalam *Smart City* masing-masing kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan baru ini disusun dan dilaksanakan adalah urgensi memenuhi kebutuhan masalah dan penyelesaian masalah, adanya inovasi dan kolaborasi serta peran kepemimpinan kepala daerah. Inovasi dan kolaborasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan baru tersebut. Beberapa inovasi yang dilaksanakan berdasar pada pembelajaran atau best practice dari kota lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu faktor kepemimpinan juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan inovasi pada kegiatan untuk pemulihan ekonomi daerah karena pemimpin yang berani akan lebih menghasilkan inovasi-inovasi yang baik dan berdampak pada penyelesaian masalah.

Faktor Yang Mempengaruhi Tipologi Pelaksanaan Kegiatan *Smart City* di Masa Pandemi COVID-19

Secara keseluruhan, faktor yang mempengaruhi tipologi pelaksanaan kegiatan smart city di Kota Yogyakarta berjumlah 18 faktor yang dibagi kedalam 6 kategori diantara kategori masyarakat, kondisi institusi, kebijakan, kolaborasi, kondisi kegiatan dan infrastruktur. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor transformasi pelayanan publik (TFP), sosialisasi kegiatan (S), kegiatan berhubungan langsung dengan masyarakat (KBM), prioritas permasalahan (PM), pemerintah responsif (PR), inovasi (I),

kepemimpinan (K), kualitas SDM (SDM), refocusing anggaran (RA), kebijakan social distancing (KSD), kolaborasi OPD (K-OPD), kesulitan koordinasi (KK), kebutuhan masyarakat (KM), keberlanjutan program (KP), penyusunan prioritas kegiatan (PPK), peleburan kegiatan (PK), pemindahan wewenang kegiatan (PWK), dan sarana prasarana baik (SPB).



Gambar 2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tipologi Pelaksanaan Kegiatan

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Tipologi yang pertama adalah kegiatan daring yang pelaksanaannya lebih cepat didorong oleh beberapa faktor diantaranya faktor kegiatan berhubungan langsung dengan masyarakat, dilaksanakannya sosialisasi kegiatan, kualitas SDM, kolaborasi antar OPD, keberlanjutan program dan kondisi sarana prasarana atau infrastruktur digital yang baik. Secara kategori, faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan kegiatan daring terdiri dari kategori masyarakat, kondisi institusi, kolaborasi, kondisi kegiatan dan kondisi infrastruktur. Sedangkan tipologi kegiatan luring yang proses implementasinya lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan lainnya hanya dipengaruhi oleh 1 (satu) faktor yakni kebutuhan masyarakat yang berada pada kategori masyarakat. Hanya terdapat 1(satu) kegiatan luring yang porses implementasinya lebih cepat yakni pemasangan Wifi Publik di ruang terbuka serta balai-balai kelurahan di Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut memang lebih cepat pelaksanaannya dikarenakan Pemkot Yogyakarta menyesuaikan dengan kegiatan kebutuhan masyarakat di masa Pandemi COVID-19 yang memerlukan koneksi internet stabil untuk dapat melaksanakan kegiatan dari rumah baik itu sekolah, kerja, diskusi dan pertemuan daring lainnya.

Tipologi kegiatan yang tidak berkontribusi terhadap pengendalian COVID-19 di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab diantaranya adalah faktor kepemimpinan, faktor kebijakan refocusing anggaran dan adanya penyusunan prioritas kegiatan. Adanya kebijakan refocusing anggaran menjadi faktor utama yang menyebabkan kegiatan-kegiatan ini terhambat pelaksanaannya di masa Pandemi COVID-19 sehingga harus dilaksanakannya penyusunan prioritas kegiatan berdasarkan dengan ketersediaan anggaran yang tersisa. Faktor kepemimpinan sangat berpengaruh pada penyusunan prioritas kegiatan Smart City di Kota Yogyakarta karena pertimbangan kegiatan-kegiatan yang tetap dilaksanakan di masa Pandemi tersebut selain dilaksanakan melalui rapat koordinasi namun juga mempertimbangkan arahan pemimpin daerah dan pimpinan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Tipologi kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai juga disebabkan oleh beberapa faktor yang hampir mirip dengan tipologi kegiatan yang tidak berkontribusi terhadap pengendalian COVID-19 yakni faktor kepemimpinan dan ditambah dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan kegiatan atau social distancing. Diberlakukannya kebijakan pembatasan kegiatan tersebut berdampak pada kegiatan-kegiatan Smart City di Kota Yogyakarta yang membutuhkan partisipasi masyarakat seperti contohnya adalah even kebudayaan pada dimensi smart branding. Pemerintah Kota Yogyakarta juga harus mematuhi kebijakan tersebut untuk dapat mengurangi beberapa kegiatan luar ruangan yang bersifat menimbulkan kerumunan. Faktor kepemimpinan juga sangat berpengaruh pada tipologi ini karena ketegasan dan kedisiplinan yang diterapkan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan OPD menjadi kunci pada tertibnya masyarakat untuk dapat mematuhi kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan.

Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya terhambat namun bukan disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19 terdiri dari 2 (dua) tipologi diantaranya adalah tipologi kegiatan yang terdampak suntaker terbaru serta kegiatan yang memerlukan integrasi linas OPD. Kegiatan yang terdampak dari suntaker terbaru terhambat pelaksanaannya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya peleburan kegiatan dan perubahan wewenang kegiatan. Penyusunan tata kinerja terbaru ini membuat banyak perubahan pada tupoksi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta karena terdapat beberapa OPD yang dileburkan menjadi satu dan terdapat pula beberapa OPD yang dipisah. Contoh OPD yang digabung menjadi satu adalah seperti Dinas Pendidikan yang dileburkan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Sedangkan contoh dinas yang dipisahkan adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dipisah menjadi Dinas Perdagangan sendiri dan Dinas Perindustrian sendiri. Hal tersebut tentu berdampak pada kondisi kegiatan yang harus menyesuaikan dengan tupoksi baru masing-masing dinas sehingga beberapa pelaksanaannya mengalami hambatan karena sedang berada pada tahap penyesuaian.

Tipologi kegiatan selanjutnya adalah kegiatan yang memerlukan integrasi lintas OPD yang pelaksanaannya terhambat dikarenakan beberapa faktor seperti kesulitan koordinasi. Banyak kegiatan di lingkup Kota Yogyakarta yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan proses integrasi sehingga memerlukan kemampuan koordinasi yang baik. Kegiatan-kegiatan yang terhambat proses pelaksanaannya dikarenakan kesulitan koordinasi adalah kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya merupakan OPD di Kota Yogyakarta dengan OPD lain yang berada di luar lingkup Kota Yogyakarta. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri karena OPD lain tersebut tidak berada di bawah wewenang Pemkot Yogyakarta lagi sehingga sulit untuk terus menerus melakukan follow up atau update terkait kerjasama kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan-kegiatan Smart City baru yang muncul di Kota Yogyakarta terdiri dari dua tipologi yakni kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional dan kegiatan untuk pengendalian COVID-19. Kedua tipologi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah inovasi, kepemimpinan, pemerintah yang responsif serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Inovasi menjadi kunci utama dalam proses pelaksanaan kegiatan baru baik untuk pengendalian COVID-19 maupun untuk pemulihan ekonomi Kota Yogyakarta. Sampai saat ini, proses-proses inovasi yang dilaksanakan pada kegiatan baru Smart City Kota Yogyakarta masih diinisiasi oleh pemerintah. Faktor kepemimpinan juga menjadi jembatan penghubung antar masyarakat dan pemerintah terkait munculnya inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh Kota Yogyakarta di masa Pandemi COVID-19. Keseluruhan kegiatan Smart City baru yang dicanangkan di Kota Yogyakarta merupakan bentuk respon pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kegiatan *Smart City* di Kota Yogyakarta terbagi kedalam beberapa kategori selama masa Pandemi COVID-19. Kegiatan yang proses implementasinya lebih cepat di dominasi oleh kegiatan yang dilaksanakan secara daring, sedangkan kegiatan yang proses implementasinya terhambat didominasi oleh kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti event-event budaya. Selain itu

kegiatan-kegiatan hasil inovasi baru didominasi oleh kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan kasus COVID-19 beserta pemulihan ekonomi di Kota Yogyakarta.

2. Terdapat 18 faktor yang secara langsung mempengaruhi kondisi pelaksanaan kegiatan *Smart City* di Kota Yogyakarta yakni faktor transformasi pelayanan publik, sosialisasi kegiatan, kegiatan berhubungan langsung dengan masyarakat, prioritas permasalahan, pemerintah responsif, inovasi, kepemimpinan, kualitas SDM, refocusing anggaran, kebijakan social distancing, kolaborasi OPD, kesulitan koordinasi, kebutuhan masyarakat, keberlanjutan program, penyusunan prioritas kegiatan, peleburan kegiatan, pemindahan wewenang kegiatan, dan sarana prasarana baik.

Rekomendasi

1. Bagi pemerintah Provinsi Kota Yogyakarta, dibutuhkan pengkajian lebih lanjut terhadap proses pengelolaan anggaran dan penyusunan prioritas kegiatan di masa Pandemi COVID-19 secara lebih spesifik dan mempertimbangkan kontribusi dengan metode yang valid dan reliable sehingga penentuan kegiatannya tidak berdasarkan normatif dan pertimbangan beberapa stakeholder saja.
2. Bagi pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat, pemerintah merupakan pengelola ekosistem *Smart City*, sehingga perlu mempersiapkan perencanaan mengenai kondisi-kondisi serta situasi yang tak terduga (seperti Pandemi COVID-19) yang mampu menghambat proses pengembangan *Smart City* di daerah masing-masing.
3. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta, dibutuhkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menaati peraturan serta perlunya perubahan pola pikir masyarakat dalam mengaktualisasikan diri sebagai sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing untuk dapat membantu pengembangan *Smart City* baik di masa Pandemi COVID-19 maupun tidak.

REFERENSI

- Farizia, Sofia, and Bagus Nuari Hermawan. 2020. "(PDF) Kota Cerdas Di Era Pandemi: Inovasi Smart Kampung Banyuwangi Menyambut New Normal." Retrieved November 7, 2021 (https://www.researchgate.net/publication/347516240_Kota_Cerdas_di_Era_Pandemi_Inovasi_Smart_Kampung_Banyuwangi_Menyambut_New_Normal).
- Firmansyah, Alfian. 2020. "Analisis Tantangan Penerapan Protokol Dan Cloud Production Deployment Pada Internet of Things Dalam Membangun *Smart City* Di Indonesia Sebagai Sustainable Development Goals Setelah Masa Pandemi COVID-19."
- Google, Temasek, and Bain Company. 2020. *E-Conomy Sea 2020 At Full Velocity : Resilient and Racing Ahead*.
- Kummitha, Rama Krishna Reddy. 2020. "Smart Technologies for Fighting Pandemics: The Techno- and Human- Driven Approaches in Controlling the Virus Transmission." *Government Information Quarterly* 37(3):101481. doi: 10.1016/j.giq.2020.101481.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin. 2008. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.